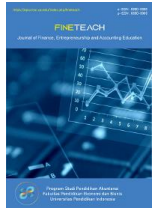




# Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



## Budget Analysis Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Bandung 2010-2020

Rieke Pitaloka\*, Nugraha, R. Dian Hardiana

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

\*Correspondence: E-mail: [riekepitaloka30@upi.edu](mailto:riekepitaloka30@upi.edu)

### ABSTRACT

This study aims to describe the direct expenditure budget and indirect expenditure budget for the poverty rate in Bandung City in 2010-2020. The method used in this study is a quantitative method with descriptive analysis, the data used is secondary data in the form of LRA obtained from the DJPK data portal of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the poverty rate of Bandung City in 2010-2020 obtained from BPS Bandung City. Sampling using Nonprobability Sampling with purposive sampling technique. Data processing in this study using IBM SPSS Software Version 26 using classical assumption test analysis, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using F test, t test and R-square test. Based on the descriptive analysis, it was found that in 2010-2020, the direct and indirect expenditure budgets fluctuated with an increasing trend, while fluctuations occurred in the poverty rate with a decreasing trend. The results of this study indicate that the direct budget does not affect the poverty rate and the indirect budget has a negative effect on the poverty rate in the city of Bandung. This means that the higher the indirect budget allocated by the local government, the higher the poverty rate in the city of Bandung.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 15 Des 2022

First Revised 10 Januari 2023

Accepted 20 Januari 2023

First Available online 20 Maret 2023

Publication Date 01 April 2023

#### Keyword:

Budget,

Direct Expenditure,

Indirect Expenditure,

Poverty Rate.

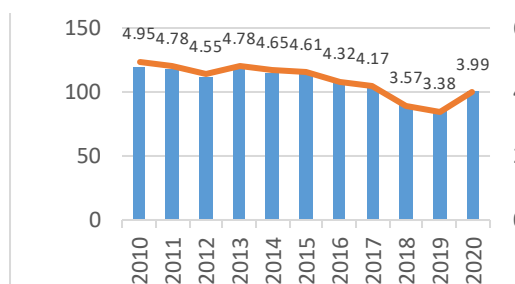
## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah atau desentralisasi berlangsung sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperkuat oleh undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah di negara Indonesia, hal tersebut menjadi salah satu wujud nyata pemerintah demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka memajukan daerahnya sendiri. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah (Kurniawan, 2012). Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Setiaji & Adi, 2007). Desentralisasi secara umum menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Selain itu, desentralisasi dapat diartikan sebagai pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Kharisma, 2013). Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002). Timbulnya keinginan diterapkannya proses desentralisasi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang atau pengalaman suatu negara, perannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi diberbagai negara serta banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Kharisma, 2013). Selaras dengan itu Lhutfi & Sugiharti (2022) berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dalam menjalankan aspek-aspek fungsional yang efektif dan efisien didasari oleh teori keagenan atau *agency theory*. Teori keagenan menjelaskan situasi dimana hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana *principal* memerintah agen untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan daerah, pemerintah daerah harus memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebutuhan rakyat agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan berkelanjutan dan tercapainya tujuan nasional. Pemerintah daerah sebagai agen bertanggungjawab dalam menentukan sebuah keputusan dan kebijakan dalam mengatasi semua permasalahan yang terjadi atas dasar kepentingan rakyat sebagai *principal*. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai setiap daerah di Indonesia yaitu tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks karena dapat berpengaruh pada permasalahan-permasalahan lain seperti pendidikan, kesehatan, kriminalitas, pengangguran dan masalah yang lainnya. Istilah kemiskinan

muncul disaat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan papan. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) dipergunakan untuk mengukur suatu batas pengelompokan penduduk menjadi miskin atau tidak (BPS, 2022). Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan diseluruh provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang mengalami kenaikan angka kemiskinan yang signifikan akibat pandemi yaitu Provinsi Jawa Barat dengan kenaikan sebesar 1,21% yang dimana pada tahun 2019 persentase sebesar 6,82% dengan jumlah 3.375,89 ribu jiwa menjadi 8,43% dengan jumlah 4.118,52 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2020 (BPS, 2022).

Provinsi Jawa Barat memiliki 16 kabupaten dan 9 kota yang tersebar, masing-masing kabupaten/kota tersebut memiliki permasalahan kemiskinan dengan tingkat penduduk miskin yang berbeda-beda. Selain menjadi permasalahan dan isu pembangunan nasional, kemiskinan pun menjadi isu pembangunan disetiap daerah khususnya di perkotaan. Menurut Ardiansyah (2009) kemiskinan ini sendiri dikota-kota besar khususnya di Indonesia salah satu penyebabnya adalah urbanisasi, dimana para urbanis yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, lebih-lebih pendidikan di desa cenderung rendah kualitasnya yang akibatnya para urbanis ini akhirnya jatuh miskin dikota-kota karena mereka tidak mampu bersaing dan menjadi penganggur, artinya pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang masih cukup besar dari kemiskinan dan disparatis sosial. Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, dan terbesar ketiga di Indonesia sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Tentang Kota Bandung, 2022). Namun nyatanya sebagai kota besar, Kota Bandung masih belum bisa memposisikan sebagai daerah yang memiliki tingkat angka kemiskinan terendah. Adapun data jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kota Bandung tahun 2010 – 2020 disajikan dalam **Gambar 1** berikut:



Sumber: BPS Kota Bandung

**Gambar 1**

**Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung 2010-2020**

Berdasarkan gambar 1 persentase angka kemiskinan di Kota Bandung selama 11 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, sama halnya dengan persentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2010 persentase angka kemiskinan sebesar 4,95% dan mengalami penurunan hingga tahun 2012 menjadi sebesar 4,55%. Enam tahun berikutnya angka kemiskinan konsisten terus menurun dari tahun 2013 sebesar 4,78% hingga

tahun 2019 menjadi sebesar 3,38%. Namun pada tahun 2020 angka kemiskinan meningkat dengan persentase sebesar 3,99%.

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung. Permasalahan kemiskinan di Kota Bandung tidak terlepas dari strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan belanja untuk perencanaan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal yang penting untuk dilihat adalah sejauh mana pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan pengaruh dan dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan dari tahun ke tahun. Semangat otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah (Sendouw, Rimate, & Rotinsulu, 2019).

Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Savitri, Dewantara, Darmayanti, Dewi, & Sari, 2019). Anggaran tidak hanya penting bagi pihak swasta tetapi juga penting bagi pemerintah. Anggaran merupakan rencana kuantitatif dalam bentuk moneter dan nonmoneter sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Efektivitas pengentasan kemiskinan di daerah memang dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya APBD yang dapat dipungkiri merupakan instrument kunci yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di daerah dan substansial berpengaruh pada pengurangan kemiskinan. Secara lebih luas, untuk memperkuat efisiensi alokasi daerah perlu dipastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan di setiap sektor merupakan bagian dari paket kebijakan yang implikasinya dapat mencapai atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah disamping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan mengurangi kemiskinan (Minggu, Rimate, & Rotinsulu, 2016).

Teori keagenan dipraktikan pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi otonom, organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan sosial masyarakat serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah. Berdasarkan teori keagenan dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah merupakan hubungan keagenan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (prinsipal) dan pemerintah (agen) sebagai penyedia jasa kepentingan rakyat. Menurut Nugraha & Amelia (2017) dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah daerah bukan berarti melakukan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kewenangan, namun pemerintah daerah memiliki tujuan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

mengukur kesejahteraan rakyat yang secara langsung berkaitan dengan indikator kemiskinan secara multidimensi. Pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan relatif secara agregat namun tidak bisa digunakan sebagai indikator kemiskinan. Kedua, kemiskinan diukur dengan pengeluaran dengan menggambarkan daya beli rata-rata masyarakat. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pendekatan ini bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejalan dengan hal di atas, upaya mencapai kesejahteraan rakyat akan merujuk pada persoalan pengelolaan keuangan daerah (see <https://mie.feb.undip.ac.id/archives/17447>). Amalia & Purbadharmaja (2014) menunjukkan bahwa IPM dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah, pengelolaan dana berupa dana alokasi belanja.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh alokasi anggaran yang menunjukkan kepemihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor budget*). Dengan melakukan upaya tersebut, masyarakat sebagai agen akan memiliki rasa kepercayaan penuh kepada pemerintah sebagai prinsipal dalam memutuskan suatu kebijakan anggaran yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan anggaran yang memihak orang miskin adalah praktek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang memasukkan suara dan kepentingan masyarakat miskin (Jasmina et al, 2001). Dalam konteks ini, paparan mengenai kebijakan anggaran yang memihak pada orang miskin (*pro-poor budget*) harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sekian banyak kebijakan lain yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Kebijakan anggaran yang dilakukan dalam pos-pos APBD khususnya pos belanja daerah masih terus diupayakan dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan program serta kegiatan kemiskinan tersebut membawa hasil berupa penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Berbagai program dan kegiatan yang diberikan pemerintah melalui anggaran belanja langsung dan belanja langsung masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Ishak J.F (2017) menganalisis variabel anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan karena belanja pemerintah merupakan aspek yang krusial bagi pemerintah, sebab besaran dari pengeluaran ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun penjelasan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lantu, Koleangan dan Rotinsulu (2019) menyimpulkan berupa alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak dapat berpengaruh dengan signifikan terhadap perubahan angka kemiskinan yang terjadi, hal ini tentunya tidak sejalan dengan visi pemerintah untuk dapat menurunkan kemiskinan melalui anggaran publik.

Menurut Arini dan Mustika (2015) menyimpulkan bahwa pengaruh anggaran belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak bisa mereduksi kemiskinan dikarenakan lebih banyak peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sektor swasta dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Aprilia, Chaidir dan Fadilyanti (2022) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2019. Menurut Ratnadi, Ariyanto, dan Wirawati (2016) menyimpulkan bahwa anggaran belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Menurut Krisyanto (2015) menyimpulkan anggaran belanja langsung mampu mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin. Belanja tidak langsung mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan kemiskinan, artinya apabila belanja tidak langsung mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan penurunan jumlah rumah tangga miskin. Namun, apabila belanja langsung mempunyai hubungan yang berlawanan arah, belanja langsung mempunyai hubungan yang searah. Maka, apabila pemerintah meningkatkan jumlah belanja tidak langsung, maka jumlah rumah tangga miskin pun meningkat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah disampaikan peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung terhadap angka kemiskinan di Kota Bandung 2010-2020. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu (1) anggaran belanja langsung berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan, (2) anggaran belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Kota Bandung 2010-2020.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari DPJK Kemenkeu RI dan BPS Kota Bandung.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung. Adapun dalam penentuan sampling menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Penetapan sampel pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bandung tahun 2010-2020.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, Uji F, Uji T dan uji R-Square.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gambaran mengenai anggaran belanja langsung di Kota Bandung selama tahun 2010 – 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Dari total anggaran selama 11 tahun, anggaran belanja langsung sebesar Rp 33.511.427 dengan rata-rata anggaran sebesar Rp 3.046.493. Anggaran belanja langsung mendapatkan proporsi rata-rata sebesar 53% dari anggaran belanja daerah Kota Bandung. Penyerapan anggaran belanja langsung selama sebelas tahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata realisasi sebesar 75%. Pertumbuhan anggaran belanja langsung berfluktuasi dengan mengikuti peningkatan dan penurunan nominal anggaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 40% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar -6%. Proporsi anggaran belanja langsung pun memberikan porsi yang besar pada belanja barang dan jasa dengan persentase sebesar 50%.

Sedangkan untuk anggaran belanja tidak langsung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Total anggaran selama sebelas tahun anggaran sebesar Rp 27.604.945 dengan rata-rata Rp 2.509.540 dan mendapatkan proporsi dari anggaran belanja daerah sebesar 47%. Adapun penyerapan anggaran belanja tidak langsung dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 101%. Pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung pun fluktuatif mengikuti peningkatan atau penurunan jumlah anggaran setiap tahunnya, dengan persentase pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 30% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2017 sebesar -10%. Pada anggaran belanja tidak langsung, proporsi yang diberikan lebih besar untuk belanja pegawai dengan rata-rata persentase sebesar 85,75%. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah memberikan porsi

yang lebih besar pada belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan anggaran belanja langsung merupakan belanja yang akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan hampir terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tidak lepas dari masalah kemiskinan. Adapun gambaran mengenai angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata angka kemiskinan selama tahun 2010-2020 sebesar 4,34%. Angka kemiskinan di Kota Bandung pun meningkat ekstrim pada tahun 2020 sebesar 3,99% dengan angka pertumbuhan sebesar 18% karena adanya pandemi covid-19 yang melanda. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan betapa besar dampak yang dihasilkan oleh pandemi. Namun pada saat yang bersamaan, hal ini memperlihatkan bahwa sistem pemerataan kesejahteraan di Kota Bandung masih rapuh dan menyebabkan warga hidup dalam kerentanan. Dalam RPJMD Kota Bandung menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan disebabkan karena beberapa faktor, antara lain rendahnya aksesibilitas warga miskin terhadap sistem sumber yang ada, ketidakberdayaan warga miskin dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya perlindungan perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji regresi linear berganda, uji f dan uji t dengan menggunakan bantuan *software IBM SPSS versi 26* maka diperoleh hasil perhitungan disajikan dalam **tabel 1** berikut:

**Tabel 1 Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std Error of the Estimate</b>
<b>1</b>	<b>.837<sup>a</sup></b>	<b>.701</b>	<b>.582</b>	<b>.0033103</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,582 yang berarti bahwa sebesar 58,2% angka kemiskinan di Kota Bandung dipengaruhi oleh variabel anggaran belanja langsung dan variabel anggaran belanja tidak langsung, sedangkan 41,8% angka kemiskinan di Kota Bandung dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, Adapun variable lainnya disajikan dalam **tabel 2** berikut ini.

Tabel 2 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	.479	.130	
	Anggaran Belanja Langsung	.001	.009	.065	.157	.882
	Anggaran Belanja Tidak Langsung	-.031	0.14	-.889	-2.114	.085

Berdasarkan hasil persamaan regresi  $Y = 0,479 + 0.001X_1 - 0,031X_2$ , nilai konstanta sebesar 0,479 yang menyatakan bahwa ketika variabel anggaran belanja langsung dan anggaran tidak langsung dianggap tidak ada atau bernilai 0, maka tidak akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Adapun hasil lainnya yang didapat adalah nilai koefisien anggaran belanja langsung atau  $X_1$  sebesar 0.001 yang artinya jika variabel lain nilainya tetap dan anggaran belanja langsung mengalami kenaikan, maka angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.001. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang searah antara anggaran belanja langsung dan angka kemiskinan, semakin meningkatnya anggaran belanja langsung semakin meningkat pula angka kemiskinan.

Nilai koefisien anggaran belanja tidak langsung atau  $X_2$  sebesar -0,031 yang artinya jika variabel lain nilainya tetap dan anggaran belanja tidak langsung mengalami kenaikan, maka angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar -0,031. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh berlawanan arah antara anggaran belanja tidak langsung dan angka kemiskinan, semakin meningkatnya anggaran belanja tidak langsung semakin menurun pula angka kemiskinan.

Adapun mengenai pengaruh anggaran belanja langsung dan anggaran belanja terhadap angka kemiskinan disajikan dalam **Tabel 3** berikut.

Tabel 3 Uji F

Anova <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	5.866	.049 <sup>b</sup>
	Residual	.000	5	.000		
	Totak	.000	7			

a. Dependent Variabel : Angka Kemiskinan  
b. Predictors : (Constant), Anggaran Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049 atau kurang dari 0,10 dengan hitung sebesar 5.866, sedangkan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 0,10 dengan  $N_1=k=2$ ,  $N_2=n-k-2 = 11-2-1=8$  menunjukkan nilai sebesar 3,11. Dengan demikian hasil perhitungan menunjukkan



bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $5.866 > 3,11$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung signifikan berpengaruh negatif secara bersama sama terhadap angka kemiskinan.

Selanjutnya mengenai pengaruh anggaran belanja parsial terhadap angka kemiskinan dijelaskan pada **tabel 4** berikut ini.

**Tabel 4 Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.479	.130		3.680	.014
	Anggaran Belanja Langsung	.001	.009	.065	.157	.882
	Anggaran Belanja Tidak Langsung	-.031	.014	-.889	-2.144	.086

a. Dependent Variabel : Angka Kemiskinan

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji t pihak kiri dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,10 atau 10%, serta derajat kebebasan yang diperoleh dari rumus  $df = n - k$  ( $11 - 2 = 9$ ) yaitu sebesar - 1.833. adapun hasil uji t pada tabel hasil uji t dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Variabel anggaran belanja langsung (X1) diperoleh t hitung sebesar 0.157 sedangkan t tabel sebesar -1.833. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $0,157 > -1.833$ ) atau dengan kata lain  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dapat diartikan bahwa anggaran belanja langsung secara parsial tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan di Aceh oleh [Wahyudi, Hamzah & Syahnur \(2014\)](#), di Kota Manado oleh [Bawimbang, Rorong & Siwu \(2021\)](#) dan penelitian yang dilakukan oleh [Dardiri, Hartoyo & Sarma \(2014\)](#) di Kabupaten Lombok Timur bahwa anggaran belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dalam hal ini dikatakan bahwa anggaran belanja langsung Pemerintah Kota Bandung belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan. Program dan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja langsung belum mampu menyentuh angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Variabel anggaran belanja tidak langsung (X2) diperoleh t hitung sebesar -2,144 sedangkan t tabel sebesar -1.833. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-2,144 < -1.833$ ) atau dengan kata lain  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang dapat diartikan bahwa anggaran belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan di Aceh oleh [Wahyudi, Hamzah & Syahnur \(2014\)](#) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa belanja tidak langsung signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Aceh dan Bawimbang, [Rorong & Siwu \(2021\)](#) menunjukkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di kota Manado. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran

belanja tidak langsung secara signifikan berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Kota Bandung tahun 2010-2020.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Budget Analysis Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Bandung 2010-2020, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Anggaran belanja langsung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2010-2020. Anggaran belanja tidak langsung berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2010-2020. Angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2010-2020. Sedangkan hasil analisis masing-masing variabel berdasarkan uji t yaitu anggaran belanja langsung secara parsial tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kota Bandung tahun 2010-2020. Anggaran belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Kota Bandung tahun 2010-2020.

#### **5. SARAN**

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini antara lain metode pengumpulan data yang bersifat sekunder menyebabkan terbatasnya informasi yang didapatkan untuk menguatkan hasil pada penelitian ini. Data sekunder ini tidak menjamin kelengkapan informasi yang dibutuhkan, karena tinggi rendahnya anggaran dan realisasi dapat dikarenakan oleh faktor internal atau eksternal pemerintah daerah. Variabel pada penelitian ini yang hanya mencakup anggaran belanja daerah juga menjadi keterbatasan, karena jika dikembangkan lagi hasil penelitian akan lebih optimal. Lokasi penelitian hanya sebatas Kota Bandung menjadi keterbatasan juga dalam penelitian ini. Selain itu, terbatasnya jumlah sampel yang diteliti pada komang berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan keterbatasan yang ada, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk mengupayakan menambah jumlah tahun pengamatan guna mendapatkan hasil yang komprehensif serta dengan perluasan ruang lingkup penelitian sehingga hasil analisis lebih lengkap dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dalam mereduksi kemiskinan. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung terhadap angka kemiskinan. Peneliti maupun studi selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang lebih spesifik dari masing-masing urusan pemerintah agar dapat mampu membantu pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang tepat dalam mengatasi angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kota Bandung dalam hal kebijakan APBD dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat lebih baik lagi dalam mengelola tanggung jawab keuangan yang lebih besar dengan menyelaraskan antara prioritas maupun kebijakan pengurangan angka kemiskinan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, mengevaluasi dan merevisi kembali kegiatan yang berdampak langsung dalam mengentaskan angka kemiskinan sebelum menjalankan kegiatan yang mempengaruhi masing-masing variabel yang menjadi indikator keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Bertanggungjawab secara konkrit dalam hal pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan melalui perbaikan sistem jaminan sosial. Membuka kesempatan berpartisipasi masyarakat miskin dalam proses pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat agar program dan kegiatan yang direncanakan tepat sasaran

## 6. REFERENSI

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(6), 257-264.
- Aprilia, Y., Chaidir, T., & Fadilyanti, L. (2022). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di kabupaten Lombok Timur tahun 2010-2019. *Jurnal Konstanta*, 1(1), 45-60.
- Ardiansyah, A., & MT, S. (2009). Dampak kemiskinan kota terhadap perumahan dan permukiman di kota-kota besar di Indonesia. *Artik. Bull*, 1-20.
- Arini, M. D. S. M., & Mustika, M. D. S. U. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali tahun 2007-2013. *E-Jurnal Ep Unud*, 4(9), 1140-1163, 1-24.
- Bawimbang, P. M., Rorong, I. P., & Siwu, H. D. (2021). Pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 523-531.
- Dardiri, Y., & Hartoyo, S. (2014). Strategi penanggulangan kemiskinan di kota Bogor melalui pendekatan anggaran dan regulasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 30-40
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, 17(1), 55-59.
- Jasmina, T., Bayhaqi, A., & Trialdi, L. (2001). Analisa peringkat penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota. *Ekonomi dan Keuangan di Indonesia*, 49, 423-449.
- Jensen, MC, & Meckling, WH (1976). Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya agensi dan struktur kepemilikan. *Jurnal ekonomi keuangan*, 3(4), 305-360.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119.
- Kristiyanto, S. (2015). Analisis pengentasan kemiskinan melalui belanja langsung dan tidak langsung pemerintah kabupaten kota di provinsi Jawa Timur. *Ekuilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 13(1), 19-32.
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 7(2), 129-144.
- Lantu, Y. S. M., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5), 1-19.

- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159-170.
- Minggu, T. D., Rimate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi swasta terhadap kemiskinan di kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 73-88.
- Nugraha, N., & Amelia, T. (2018). Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2011–2014. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(1), 51-72.
- Ratnadi, D. (2017). Analisis pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 11(1), 1-13.
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis faktor penyebab dan akibat dari ketidaktepatan waktu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Buleleng tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 59-71.
- Sendouw, A., Rimate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Pengaruh belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5), 1-15.
- Setiaji, W., & Adi, PH (2007). Peta kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah: apakah mengalami pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*, 1-29.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. In *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (pp. 1-25).
- Wahyudi, R., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2014). Analisis belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(3), 49-59.